

**PENGARUH PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA**

DAFFA ADRIANDI ZUHDI FARHAN
NPP. 30.0078

Asdaf Kabupaten Karo, Sumatera Utara
Program Studi Keuangan Publik
Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Dedeh Maryani, MM

ABSTRACT

Problem Statement : Even though Karo Regency has received WTP opinions for the last 3 years, it does not mean that the Local Government Financial Statements are completely correct. There are still several shortcomings and obstacles in terms of implementing government accounting standards in the Karo Regency Government. The notes of BPK's findings on the examination of the 2021 financial statements include, local transportation costs within the North Sumatra region do not reflect real costs and there are overpayments for official travel expenses; payment of school operational assistance (BOS) funds for state civil apparatus honorariums is not in accordance with the provisions and accountability of BOS funds is not in accordance with real conditions; lack of volume and quality of work in three regional apparatus work units (SKPD) resulting in overpayment; The administration of fixed assets has not been orderly. **Purpose:** This study aims to analyze the effect of the application of government accounting standards on the quality of financial statements of the Regional Government of Karo Regency. **Method :** The data collection method used is a questionnaire. The data analysis technique used by the author is descriptive statistical analysis to answer problem formulations number 1 and 2, while to answer problem formulation 3 the author uses hypothesis testing using the JASP application program (Jeffrey's Amazing Statistics Program) **Result:** The results showed that the application of government accounting standards had a significant effect on the quality of the financial statements of the Regional Government of Karo Regency with the results of the coefficient of determination showing a value of 54%, which means that the variable of government accounting standards is able to explain the variable quality of local government financial statements by 54%. **Conclusion:** Based on the questionnaire, the highest dimension is the measurement dimension with a percentage of 82.47%. While the lowest dimension is load recognition with a percentage of 81.70%. The variable of quality of local government financial statements has the highest dimension, namely the relevant dimension with a percentage of 84.80%. While the lowest dimension can be understood with a percentage of 82.42%. There is an influence of the application of government accounting standards on the quality of financial statements of regional governments in the Karo Regency Government by 54%. **Suggestion:** It is expected that employees who play a role in the scope of preparing local government financial statements will always be responsible, work honestly, appropriately and regularly, improve competence. The Karo Regency Government must implement good governance accounting standards.

Keywords: Government Accounting Standards, Quality of Financial Statements of the Regional Government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Walaupun Kabupaten Karo sudah mendapatkan opini WTP selama 3 tahun terakhir bukan berarti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah benar seutuhnya. Masih terdapat beberapa kekurangan dan hambatan dalam hal penerapan standar akuntansi pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Karo. Adapun catatan temuan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2021 diantaranya, biaya transportasi lokal dalam wilayah Sumatera Utara tidak mencerminkan biaya riil dan terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas; pembayaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk honorarium aparatur sipil negara tidak sesuai dengan ketentuan dan pertanggungjawaban dana BOS tidak sesuai dengan kondisi senyatanya; kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran; penatausahaan aset tetap belum tertib. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. **Metode :** Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis statistik deskriptif untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2, sedangkan untuk menjawab rumusan masalah 3 penulis menggunakan uji hipotesis dengan menggunakan program aplikasi JASP (Jeffrey's Amazing Statistic Program). **Hasil :** Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai 54% yang artinya variabel standar akuntansi pemerintahan mampu menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 54%. **Kesimpulan :** Berdasarkan kuesioner tersebut dimensi tertinggi yaitu dimensi pengukuran dengan persentase 82,47%. Sedangkan dimensi terendah adalah pengakuan beban dengan persentase 81,70%. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dimensi tertinggi yaitu dimensi relevan dengan persentase 84,80%. Sedangkan dimensi terendah adalah dapat dipahami dengan persentase 82,42%. Terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Kabupaten Karo sebesar 54%. **Saran :** Diharapkan para pegawai yang berperan dalam lingkup penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar senantiasa untuk bertanggung jawab, bekerja secara jujur, tepat dan teratur, meningkatkan kompetensi. Pemerintah Kabupaten Karo harus menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Karo terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan sehingga Kabupaten Karo selama 3 tahun terakhir dapat mempertahankan opini WTP yang diberikan oleh BPK perwakilan Sumatera Utara. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo mempertahankan opini tersebut dengan berusaha menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki kualitas dan memenuhi kriteria nilai terkait informasi keuangan yang telah menjadi suatu persyaratan. Tentunya hal ini merupakan beban dan tanggung jawab yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk mempertahankan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Karo berusaha mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Walaupun Kabupaten Karo sudah mendapatkan opini WTP selama 3 tahun terakhir bukan berarti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah benar seutuhnya. Masih terdapat beberapa kekurangan dan hambatan dalam hal penerapan standar akuntansi pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Karo. Adapun catatan temuan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2021 diantaranya, biaya transportasi lokal dalam wilayah Sumatera Utara tidak mencerminkan biaya riil dan terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas; pembayaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk honorarium aparatur sipil negara tidak sesuai dengan ketentuan dan pertanggungjawaban dana BOS tidak sesuai dengan kondisi senyatanya; kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran; penatausahaan aset tetap belum tertib.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Karo, kemudian penulis memilih mengangkat penulisan yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara”.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian oleh Surya Adhitama (2017), penulis mempunyai persamaan yakni menggunakan metode kuantitatif. Namun memiliki perbedaan variabel dan lokasi penulisan. Dalam penelitian oleh Astika Rahmawati, Wayan Mustika, Lilik Handaya Eka (2018) terdapat persamaan dalam jenis penulisan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Namun memiliki perbedaan dalam teori yang digunakan. Penulisan oleh Kumia Rahma dan Zulkifli (2018). Penulisan ini memiliki persamaan dalam jenis penulisan yaitu menggunakan metode kuantitatif, hanya saja memiliki perbedaan dalam lokus penulisan yakni wilayah dan organisasinya. Penulisan yang dilakukan oleh Budhi Purwantoro Jati (2019) terdapat persamaan dalam jenis penulisan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Namun memiliki perbedaan dalam teori yang digunakan dan wilayah penulisan. Penulisan yang dilakukan Ismul Aksan, Doddy Setiawan, Evi Gantiyowati, (2019) terdapat persamaan dalam jenis penulisan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Namun memiliki perbedaan variabel dan lokasi penulisan. Penulisan yang dilakukan oleh Hartono dan Ramdany (2020) terdapat persamaan dalam jenis penulisan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Namun memiliki perbedaan dalam

teori yang digunakan dan wilayah penulisan. Penulisan yang dilakukan oleh KEES CAMFFERMAN (2020) memiliki persamaan dalam tujuan penulisan. Namun memiliki perbedaan dalam teori yang digunakan dan metode penulisan. Penulisan yang dilakukan oleh Ni Putu Trisna Windika Pratiwi dan Ni Putu Eka Widyastuti (2021) memiliki persamaan dalam jenis penulisan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Namun memiliki perbedaan dalam teori yang digunakan dan lokasi penulisan. Penulisan yang dilakukan oleh Hari Munira (2021) memiliki persamaan dalam jenis penulisan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Namun memiliki perbedaan dalam teori yang digunakan dan lokasi penulisan. Penulisan yang dilakukan oleh Pawan Adhikari, Tobias Polzer, Levi Garseth-Nesbakk, Cong Phuong Nguyen, (2021) memiliki persamaan dalam jenis penulisan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Namun memiliki perbedaan dalam teori yang digunakan dan variabel penulisan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Perbedaan pada penelitian kali ini adalah lokus penelitian, dimana pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pemerintahan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

1.5. Tujuan

Untuk memperoleh gambaran tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan di Kabupaten Karo dan gambaran tentang kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. Serta penjelasan mengenai besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.

II. METODE

Berdasarkan variabel dalam penulisan ini, penulis menerapkan metode kuantitatif serta penulisan korelasional yang bersifat hubungan kausal. karena hubungan kausal menjelaskan hubungan sebab akibat. Menurut Suryani dan Hendryadi (2018: 120) hubungan kausal pada penulisan korelasional yaitu "diartikan sebagai hubungan atau korelasi sebab akibat. Artinya, variabel bebas akan memberikan pengaruh terhadap sebagai variabel terikat"..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Kabupaten Karo (X)

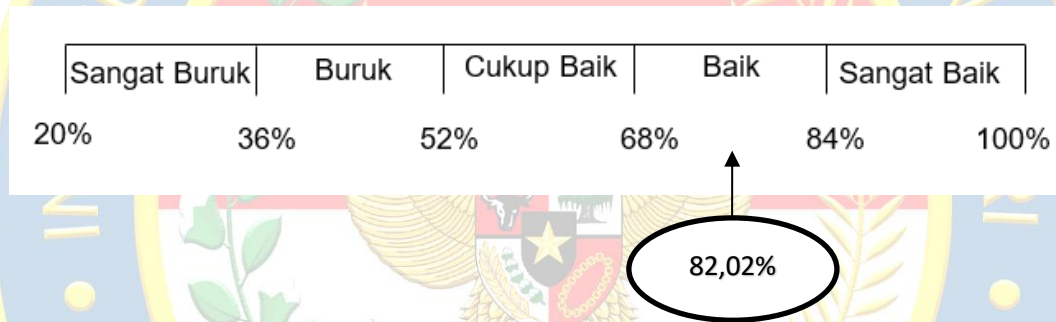
Berikut ini adalah rekapitulasi analisis deskriptif variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X) berdasarkan jawaban responden dalam kuesioner penelitian berdasarkan 4 dimensi yaitu Pengukuran, Pengakuan Pendapatan, Pengakuan Beban dan Pengungkapan Penuh.

Tabel 1
Rekapitulasi Analisis Deskriptif Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

Dimensi	Persentase	Kategori
Pengukuran	82,47%	Baik
Pengakuan Pendapatan	82,12%	Baik
Pengakuan Beban	81,70%	Baik
Pengungkapan Penuh	81,77%	Baik
Rata-rata	82,02%	Baik

Sumber: Hasil olah data kuesioner, 2023

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan, gambaran Standar Akuntansi Pemerintahan (X) mendapatkan persentase sebesar 82,02%. Nilai persentase sebesar 82,02% jika dipetakan kedalam gambar garis kontinum, maka nilai persentase tersebut akan tampak seperti berikut:



Gambar 2

Garis Kontinum Tanggapan Responden Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase sebesar 82,02% berada pada rentang antara > 68% sampai 84% dan dikategorikan baik. Dengan demikian diketahui bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X) tergolong baik. Dimensi tertinggi adalah pengukuran sebesar 82,47% sedangkan dimensi terendah adalah pengakuan beban sebesar 81,70%.

3.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo (Y)

analisis deskriptif variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) berdasarkan jawaban responden dalam kuesioner penelitian berdasarkan 4 dimensi yaitu Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan dan Dapat Dipahami.

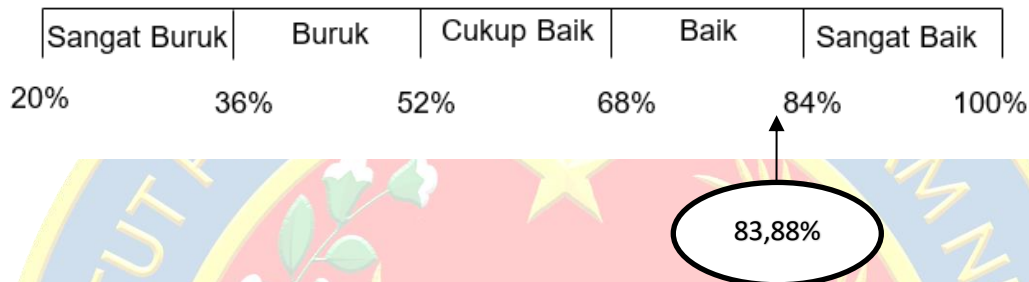
Tabel 2
Rekapitulasi Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Dimensi	Persentase	Kategori
Relevan	84,80%	Sangat Baik
Andal	83,76%	Baik

Dapat Dibandingkan	84,55%	Sangat Baik
Dapat Dipahami	82,42%	Baik
Rata-rata	83,88%	Baik

Sumber: Hasil olah data kuesioner, 2023

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan, gambaran Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) mendapatkan persentase sebesar 83,88%. Nilai persentase sebesar 83,88% jika dipetakan kedalam gambar garis kontinum, maka nilai persentase tersebut akan tampak seperti berikut:



Gambar 2

Garis Kontinum Tanggapan Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase sebesar 83,88% berada pada rentang antara > 68% sampai 84% dan dikategorikan baik. Dengan demikian diketahui bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) tergolong baik. Dimensi tertinggi adalah relevan sebesar 84,80% sedangkan dimensi terendah adalah dapat dipahami sebesar 82,42%.

3.3. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Pada sub bab ini, hipotesis konseptual yang diajukan sebelumnya akan diuji dan dibuktikan dengan menggunakan pengujian statistik yaitu regresi linier sederhana. Hipotesis konseptual yang diajukan yaitu pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

A. Uji Asumsi Normalitas

Untuk menguji asumsi normalitas juga dapat digunakan pendekatan analisis grafik, yakni Q-Q (quantile-quantile) plot. Pada pendekatan Q-Q plot, jika titik-titik (dots) menyebar jauh (menyebarkan berkeluk-luk pada garis diagonal seperti ular) dari garis diagonal, maka diindikasikan asumsi normalitas tidak dipenuhi. Jika titik-titik menyebar sangat dekat pada garis diagonal, maka asumsi normalitas dipenuhi. Berdasarkan gambar uji normalitas dalam penelitian ini, diperoleh titik-titik (dots) menyebar cukup dekat dari garis diagonal, maka asumsi normalitas dipenuhi.

B. Regresi Linier Sederhana

Persamaan regresi linier sederhana di atas memiliki nilai koefisien regresi variabel X (Standar Akuntansi Pemerintahan) sebesar 0,607 dengan tanda positif. Artinya arah pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah berbanding lurus/ searah, artinya jika Standar Akuntansi Pemerintahan baik maka akan menyebabkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik pula dan sebaliknya.

C. Pengujian Hipotesis

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

H0 : Standar Akuntansi Pemerintahan (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

H1 : Standar Akuntansi Pemerintahan (X) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai thitung sebesar 10,040. Sedangkan harga kritis nilai ttabel dengan derajat bebas $n - 2 = 88 - 2 = 86$ pada α (0,05) sebesar 1,988. Dengan demikian thitung (10,040) > ttabel (1,988) ($p < 0,001$) sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti Standar Akuntansi Pemerintahan (X) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

D. Koefisien Determinasi

Berikut ini hasil analisis koefisien determinasi menggunakan JASP 16.4 untuk mengetahui besarnya pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi adalah 54,0% ($0,7352 \times 100\%$). Koefisien determinasi sebesar 54% yang berarti Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 54% ditentukan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (X) sedangkan sisanya 46% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 54%.

3.4. Diskusi Temuan Utama

Merujuk kepada hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada kesesuaian standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Terbukti dari opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo pada 6 tahun terakhir.

Tabel 3
Perkembangan Opini BPK Terhadap LKPD

Tahun	Opini
(1)	(2)
2016	TMP
2017	WDP
2018	WDP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP

Sumber: www.karokab.go.id dan diolah oleh penulis

Pemerintah Kabupaten Karo terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan sehingga Kabupaten Karo selama 3 tahun terakhir dapat mempertahankan opini WTP yang diberikan oleh BPK perwakilan Sumatera Utara. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo mempertahankan opini tersebut dengan berusaha menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki kualitas dan memenuhi kriteria nilai terkait informasi keuangan yang telah menjadi suatu persyaratan. Tentunya hal ini merupakan beban dan tanggung jawab yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk mempertahankan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Karo berusaha mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kuesioner tersebut dimensi tertinggi yaitu dimensi pengukuran dengan persentase 82,47%. Sedangkan dimensi terendah adalah pengakuan beban dengan persentase 81,70%. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dimensi tertinggi yaitu dimensi relevan dengan persentase 84,80%. Sedangkan dimensi terendah adalah dapat dipahami dengan persentase 82,42%. Terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Kabupaten Karo sebesar 54%.. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini terbatas waktu dan biaya peneliti, sehingga hanya dapat dilakukan pada satu daerah saja untuk diteliti. **Arah Masa Depan Penelitian.** Penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis memberikan saran untuk dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya pada lokasi atau program yang sama dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Daerah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada PNS Kabupaten Karo sebagai responden yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis. Dan juga kepada Orang Tua yang telah berjasa besar terhadap selesainya penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Astika Rahmawati, Wayan Mustika, Lilik Handaya Eka. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan TekNomorlogi Informasi dan sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan
- Budhi Purwantoro Jati. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- Hari Munira. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
- Hartono, Ramdany. (2020). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Intern dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- Ismul Aksan, Doddy Setiawan, Evi Gantayowati. (2019). Research Development Related To Implementation Of Financial Accounting Standards In Indonesia
- KEES CAMFFERMAN. (2020). International Accounting Standard Setting and Geopolitics
- Kurnia Rahma, Zulkifli. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan(Standar Akuntansi Pemerintahan) Berbasis AkruaI dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul
- Ni Putu Eka Widyastuti, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar
- Surya Adhitama. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Standar Akuntansi Pemerintahan), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Suryani dan Hendryadi. (2018). Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi. Jakarta: Prenadamedia Group
- Tobias Polzer, Pawan Adhikari, Cong Phuong Nguyen, Levi Garseth-Nesbakk. (2021). Adoption of the International Public Sector Accounting Standards in low-income countries emerging ecoNomormies nations and: a structured review of literature.
- Wilopo. (2001). Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah

